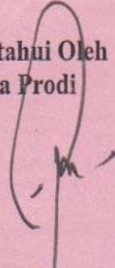



PERSETUJUAN UJIAN TUGAS AKHIR
POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN PADANG
PARIAMAN

Nama : Romi Adriansyah
Nim : 57869
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi


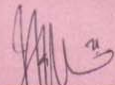
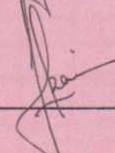
Diketahui Oleh
Ketua Prodi


Perengki Susanto, SE, M.Sc
NIP. 19810404 200501 1002

Padang, Februari 2014
Disetujui Oleh
Pembimbing


Charoline Cheisviyanny, SE, M. Ak
NIP. 19740706 199903 2 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR**POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN
PADANG PARIAMAN****Nama : Romi Adriansyah****BP/NIM : 2010/57869****Program Studi : Akuntansi (DIII)****Fakultas : Ekonomi****Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir****Program Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi****Universitas Negeri Padang****Padang, Februari 2014****Tim Penguji**

Nama	Tanda Tangan
1. Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak (Ketua)	 _____
2. Herlina Helmy, SE, Ak, M.S, Ak (Anggota)	 _____
3. Friyatmi, S.Pd, M.Pd (Anggota)	 _____

ABSTRAK

Romi Adriansyah (2010) : Potensi Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Padang Pariaman

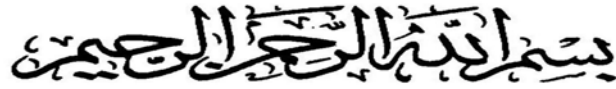
Pembimbing : Charoline Cheisviyanny, SE, M. Ak

Pajak merupakan sumber keuangan yang sangat penting untuk mengelola keuangan negara. Pajak sebagai penerimaan negara yang mempunyai dampak yang jelas yaitu apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan negara pun meningkat. Sehingga negara dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Salah satu jenis penerimaan Negara dari pajak adalah pajak kendaraan bermotor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan mengukur tingkat potensi pajak kendaraan bermotor.

Bentuk penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian observasi (pengamatan), karena penelitian ini hanya melihat dan mengamati masalah-masalah apa yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Padang Pariaman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Padang Pariaman sudah efektif. Dapat dilihat dari besarnya pendapatan yang didapat dari pemungutan pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat menunjang pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Potensi Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Padang Pariaman”**.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Ayahanda, Ibunda tercinta, kakak dan adikku tersayang yang selalu memberi dorongan, motivasi, kasih sayang dan doanya kepada penulis selama ini.
2. Ibu Charoline Cheisviyanny SE, M.Ak pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

3. Ibu Nelvirita, SE, M.Si, Ak sebagai pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, nasehat dan bimbingan dalam melanjutkan studi di Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Herlina Helmy, SE, Akt, M.S.Ak, dan ibu Friyatmi, S.Pd, M.Pd tim penguji yang memberikan saran dan masukan untuk perbaikan dan kesempurnaan tugas akhir ini.
5. Bapak Perengki Susanto, SE, M.Si, Ketua Program Studi DIII FE UNP.
6. Bapak dan Ibu dosen, Staf pengajar dan Karyawan program studi DIII FE UNP yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama diperkuliahan.
7. Bapak Yongki, SE selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Padang Pariaman yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi untuk tugas akhir penulis.
8. Rekan- rekan mahasiswa program studi DIII FE UNP khususnya Akuntansi DIII.
9. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bimbingan, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang sesuai dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin. Dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan

saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian tugas akhir
dimasa mendatang.

Padang, Januari 2014

Romi Adriansyah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pajak	8
B. Pajak Daerah	13
C. Pajak Kendaraan Bermotor	16
D. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	20
E. Potensi Pajak Kendaraan Bermotor	21
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir.....	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
C. Rancangan Penelitian.....	23
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Profil Perusahaan.....	26
B. Pembahasan	31
1. Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	31
2. Realisasi Penerimaan PKB UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Kendaraan Tahun 2012	33

3. Efektivitas Pemunggutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPTD Pelayanan Pendapatan di Kabupaten Padang Pariaman	34
4. Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPTD Pelayanan Pendapatan di Kabupaten Padang Pariaman	35
5. Perhitungan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Padang Pariaman	36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	37
B. Saran	38

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Mekanisme Perhitungan Pembayaran dan Pelaporan dengan Sistem Self Assesment DPKA Kabupaten Padang Pariaman
2. Gambar 2. Pemungutan pajak kendaraan bermotor Sumber : UPTD Padang Pariaman

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Realisasi PKB pada UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Padang Pariaman
2. Tabel 4.1 Realisasi Penerimaan Pendapatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Padang Pariaman
3. Tabel 4.2 Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor di Padang Pariaman Tahun 2009-2012
4. Table 4.3 Jumlah Kendaraan Bermotor di UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Padang Pariaman
5. Tabel 4.4 Perhitungan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) UPTD Pelayanan Kabupaten Padang Pariaman

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Observasi
2. Data Realisasi Penerimaan PKB Menurut Jenis Kendaraan pada UPTD
Pelayanan Pendapatan Provinsi di Pariaman Bulan Desember Tahun 2012
3. Jurnal Bimbingan Tugas Akhir

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber keuangan yang sangat penting untuk mengelola keuangan negara. Pajak sebagai penerimaan negara yang mempunyai dampak yang jelas yaitu apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan negara pun meningkat. Sehingga negara dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Salah satu jenis penerimaan negara dari pajak adalah pajak kendaraan bermotor.

Padang Pariaman merupakan kabupaten yang memiliki beberapa sumber daya alam yang dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Instansi pemungutan pajak kendaraan bermotor pariaman terdiri dari Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Padang Pariaman dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Kota Pariaman. Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Pariaman lebih besar dari pada di Kota Pariaman karena banyaknya masyarakat yang menggunakan sepeda motor. Dengan demikian diharapkan kabupaten Padang Pariaman mampu memberikan pelayanan yang tepat, cepat dan terpadu kepada masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka dituntut kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan kewenangan yang akan digunakan untuk pembiayaan dalam

melaksanakan kegiatan Pemerintah. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan dalam pembiayaan pembangunan perlu dikelola dengan baik, yang dalam hal ini dibutuhkan berbagai kebijakan yang lebih komprehensif, efektif dan efisien dalam pengelolaannya.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini memberikan dampak yang luas terhadap perkembangan pemerintahan di daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya pemberian otonomi daerah memberikan implementasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan yang lebih mandiri.

Meskipun demikian Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan yang dapat memberikan kontribusi yang sangat besar dibandingkan penerimaan dari sektor lainnya. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-undang tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* menyebutkan bahwa jenis-jenis Pajak Daerah meliputi pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota.

Pajak Provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan

pajak rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Salah satu jenis pajak daerah seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah pajak kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan salah satu objek pajak yang potensial untuk dipungut oleh Kabupaten Padang Pariaman. Sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan usaha, kabupaten Padang Pariaman merupakan lahan yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya usaha di bidang transportasi bagi masyarakat, yang merupakan potensi untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah.

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kewajiban masyarakat atas kepemilikan kendaraan bermotor. Semua jenis pajak kendaraan bermotor di kabupaten Padang Pariaman dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) kabupaten Padang Pariaman.

Menurut Surat Keputusan Bersama Kapolri, Dirjen PUOD dan Direktur PT. Jasa Raharja (persero) Nomor: SKEP/02/X/1999 Tanggal 15 Oktober 1999 Tentang Pedoman Tatalaksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Secara keseluruhan pajak kendaraan bermotor dipandang sebagai salah satu jenis pajak yang sangat potensial dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Banyaknya kendaraan bermotor membuat potensi penerimaan pajak ini cukup besar. Tarif yang dikenakan oleh pajak ini bervariasi tergantung jenis, tahun perakitan dan CC mesin kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang terbagi menjadi kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan bermotor roda empat keatas.

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2007-2012

NO	TAHUN	JUMLAH KENDARAAN	PAD	PKB	KONTRIBUSI
1	2007	-	1.200.000.000,00	2.352.725.349,22	196,06
2	2008	37.243	1.401.325.788,00	2.082.419.700,25	148,6
3	2009	40.871	1.401.325.788,00	1.774.450.200,00	126,2
4	2010	46.140	1.401.325.788,00	2.158.741.250,00	154,04
5	2011	26.210	1.401.325.788,00	2.001.257.436,00	142,81
6	2012	31.008	1.401.325.788,00	2.296.476.135,00	163,88

Dari data pendapatan asli daerah yang didapatkan di Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumatera Barat pada Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) pendapatan Provinsi di Padang Pariaman menggambarkan ketidakstabilan antara target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dilihat pada tahun 2007 s/d 2012 dari pendapatan asli daerah kota Pariaman.

Secara garis besar dapat disimpulkan dari tahun ke tahun terjadi ketidakstabilan kontribusi antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan pajak kendaraan bermotor. Mungkin itu dikarenakan kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor.

Ini menggambarkan bahwa masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman kurang menyadari akan hak dan tanggung jawabnya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, kesimpulan ini dapat dilihat dari data yang didapatkan dari Unit Pelayanan Teknis Daerah. Masalah ini dapat menghambat dalam upaya meningkatkan proses pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman. Bagi pengendara motor untuk meningkatkan kesadaran masyarakat selaku wajib pajak serta memberikan pemahaman betapa pentingnya disiplin membayar pajak tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis bahas di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tentang **“Potensi Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Padang Pariaman”**.

B. Perumusan Masalah

Kendaraan bermotor merupakan objek pajak yang potensial sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah perlu dikelola dengan baik, karena kontribusi yang diberikan oleh pajak tersebut relatif besar dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya. Maka sangat menarik untuk dilakukan penelitian sebagai upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan

bermotor sehingga kontribusinya terhadap penerimaan Pemerintah Daerah secara keseluruhan dapat meningkat.

Administrasi perpajakan mempunyai peranan penting dalam mengelola dan melaksanakan pemungutan pajak dengan memperhatikan sistem dan azas-azas perpajakan yang berlaku yaitu Kebijakan Perpajakan (*Tax policy*), undang-undang Perpajakan (*Tax Law*) serta didukung dengan Sistem Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*) yang baik sehingga sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas pajak kendaraan bermotor di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Padang Pariaman ?
2. Bagaimana potensi pajak kendaraan bermotor di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Padang Pariaman ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan aspek dan hal-hal berikut:

1. Menjelaskan efektifitas pajak kendaraan bermotor di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Padang Pariaman.
2. Menjelaskan potensi pajak kendaraan bermotor di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat baik secara teoretis maupun secara praktis. Secara teoretis hasil penelitian diharapkan bermanfaat dalam khasanah pengetahuan khususnya bidang pelaporan keuangan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama bagi:

1. Bagi peneliti, Penelitian ini merupakan sarana berlatih untuk memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan dalam melakukan penelitian serta mendalami teori yang berkaitan dengan administrasi dan potensi perpajakan.
2. Bagi Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) pendapatan Provinsi di Padang Pariaman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Pelayanan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) pendapatan Provinsi di Padang Pariaman khususnya gambaran mengenai potensi pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan metode penelitian observasi. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab pokok permasalahan tentang Potensi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Padang Pariaman. Pemungutan pada analisis uraian sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman sangat efektif dalam menunjang pembangunan instansi pemerintahan di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Tingkat Potensi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Padang Pariaman sangat efektif dikarenakan kesadaran masyarakat untuk membayar kewajibannya sangat tinggi sebagai pemilik kendaraan bermotor. Potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2012 sebesar Rp 10,257,111,100. Jenis kendaraan yang realisasi penerimaan PKB nya yang paling potensial adalah sepeda motor yaitu sebesar Rp 4.939.749.152. Jenis kendaraan yang realisasi penerimaan PKB yang paling kecil adalah alat berat yaitu sebesar Rp 3.835.650.

B. Saran

1. Sebaiknya pengambilan formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan Pembayaran pada kasir menggunakan sistem counter untuk memudahkan dalam pengantrian pembayaran pajak agar tidak terjadi keributan.
2. Sebaiknya pemerintah memberikan training kepada masyarakat tentang tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor yang benar agar masyarakat tidak tertipu dengan para calo.
3. Untuk mengurangi penunggakan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh wajib pajak sebaiknya dilakukan sosialisasi perpajakan secara luas kepada masyarakat selaku wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan. 2000. *Himpunan Peraturan tentang Pelaksanaa Samsat*. PT. Jasa Raharja (Persero)
- Devano, Sony. 2006. *Perpajakan*. Jakarta : Kencana
- Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. 2007. *Pajak Kendaraan*. Sumatera Barat
- Fitriandi, Primandita, dkk. 2010. *Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat
- Kasat Lantas Polres Padang Pariaman, Kepala UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi di Pariaman. 2006. *Standar Pelayanan Minimal*. PT. Jasa Raharja (Persero)
- Rosdiana, Haula. 2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Jakarta : Salemba Empat